

TRANSFORMASI KEBIJAKAN KURIKULUM DI INDONESIA: STUDI KEPUSTAKAAN DARI K13 KE KURIKULUM MERDEKA

Ibrahim¹, Anggi Enjelita², Safira Aulia³, M. Firdaus Novansyah⁴, Fatmawaty⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri,

Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: ibrahim_uin@radenfatah.ac.id

Article History

Received: 06-01-2026

Revision: 29-01-2026

Accepted: 31-01-2026

Published: 02-02-2026

Abstract. This study aims to examine changes in curriculum policy in Indonesia from the 2013 Curriculum to the Merdeka Curriculum through a literature review approach. The method employed is library research by analyzing national and international journals, academic books, research reports, and relevant policy documents. The data sources for this study were drawn from national and international scientific journals, academic books, education policy documents, research reports, and official regulations related to the 2013 Curriculum and the Merdeka Curriculum. Data analysis is conducted using a descriptive thematic approach to identify conceptual shifts, policy directions, and the implications of implementation at the educational unit level. The findings indicate that the implementation of the Merdeka Curriculum is a response to the need for learning that is more flexible, contextual, and learner-centered. This curriculum emphasizes teacher autonomy, differentiated learning, and the simplification of competency achievements, in contrast to the 2013 Curriculum, which tends to be more structural and administrative. The successful implementation of the Independent Curriculum is greatly determined by the readiness of educators, the availability of supporting facilities, and the consistency of policies. This curriculum transformation is a strategic step to improve the quality of education, although it still requires continuous guidance and evaluation

Keywords: 2013 Curriculum Curriculum Policy Transformation, Merdeka Curriculum

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka melalui pendekatan studi literatur. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan. Sumber data penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pendidikan, laporan penelitian, serta regulasi resmi terkait Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-tematik untuk mengidentifikasi pergeseran konsep, arah kebijakan, dan implikasi implementasinya pada satuan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka merupakan respons atas kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini menekankan otonomi guru, pembelajaran berdiferensiasi, serta penyederhanaan capaian kompetensi, berbeda dengan Kurikulum 2013 yang cenderung lebih struktural dan administratif. Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat ditentukan oleh kesiapan pendidik, ketersediaan sarana pendukung, serta konsistensi kebijakan. Transformasi kurikulum ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, meskipun tetap memerlukan pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Transformasi Kebijakan Kurikulum

How to Cite: Ibrahim., Enjelita, A., Aulia, S., Novansyah, M. F., Fatmawaty. (2026). Transformasi Kebijakan Kurikulum di Indonesia: Studi Kepustakaan dari K13 ke Kurikulum Merdeka. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (1), 1418-1430. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.4971>

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perubahan kurikulum merupakan fenomena yang terus berlangsung dari waktu ke waktu dan kerap dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum 2013 hadir sebagai penyempurnaan dari KTSP dengan karakter yang lebih struktural dan administratif, sementara Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Pergeseran ini menegaskan bahwa kurikulum bersifat dinamis dan harus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan global. Kebaruan kajian ini terletak pada perbandingan komprehensif antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, khususnya dari aspek konsep, karakteristik, dan sistem penilaian, sehingga memberikan gambaran utuh tentang perubahan paradigma pendidikan.

Dampak perubahan kebijakan kurikulum hampir selalu muncul seiring dengan pergantian kepemimpinan, karena kebijakan tersebut dipengaruhi oleh individu atau kelompok yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (Iskandar et al., 2023). Perubahan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang bersifat positif maupun negatif bagi penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum memegang peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan, sebab tanpa kurikulum yang tepat, pencapaian tujuan pendidikan akan sulit diwujudkan. Selain berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, kurikulum juga mengatur struktur dan muatan materi yang harus ditempuh peserta didik sebagai syarat kelulusan. Oleh karena itu, kurikulum perlu dirancang secara cermat agar mampu memenuhi kebutuhan akademik, mendukung pembentukan karakter, serta mengembangkan keterampilan nyata peserta didik.

Perubahan kebijakan kurikulum tidak terlepas dari dampak positif dan tantangan implementatif, baik bagi guru maupun peserta didik. Keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan pendidik, dukungan sarana prasarana, serta konsistensi kebijakan. Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas intrakurikuler, otonomi guru, dan pembelajaran berdiferensiasi, namun juga menuntut kesiapan profesional guru dan kemandirian belajar siswa. Oleh karena itu, transformasi kurikulum perlu disertai pendampingan dan evaluasi berkelanjutan agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia dari Kurikulum 2013 (K13) menuju Kurikulum Merdeka melalui pendekatan studi kepustakaan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis perubahan landasan konseptual, arah kebijakan, karakteristik utama, serta implikasi

implementasi kedua kurikulum dalam konteks pendidikan nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Kurikulum Merdeka sebagai respons terhadap dinamika global, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pembelajaran yang lebih adaptif. Melalui sintesis literatur nasional dan internasional, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman analitis mengenai pergeseran paradigma pendidikan serta menjadi rujukan konseptual bagi pendidik, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam merespons transformasi kurikulum secara kritis dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Creswell, 2016), untuk menganalisis transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia dari Kurikulum 2013 (K13) menuju Kurikulum Merdeka. Studi kepustakaan dipilih karena relevan untuk mengkaji perubahan kebijakan, landasan konseptual, serta dinamika paradigma pendidikan berdasarkan sumber-sumber tertulis yang kredibel dan sistematis. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan (Ibrahim et al., 2025), dengan transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia. Data berasal dari jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan resmi seperti peraturan kementerian pendidikan. Selain itu, sumber pendukung mencakup hasil evaluasi implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah maupun institusi pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan inventarisasi literatur, seleksi sumber berdasarkan relevansi dan validitas akademik, serta dokumentasi data secara sistematis (Annur, 2018; Ibrahim et al., 2023; Sugiyono, 2022). Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-tematik. Tahapan analisis meliputi reduksi data untuk memilah informasi utama, pengelompokan tema yang berkaitan dengan karakteristik K13 dan Kurikulum Merdeka, arah kebijakan, serta implikasi implementasi di satuan pendidikan, kemudian penarikan kesimpulan secara analitis.

Keabsahan data dan validitas teoritis dalam penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, konsistensi argumentasi, serta perbandingan kritis antar literatur (Miles et al., 2019). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia serta kontribusi konseptual bagi kajian kebijakan dan pengembangan kurikulum pendidikan nasional.

HASIL

Gambaran Umum Kurikulum 2013 (K13)

Menurut Mulyono dalam penelitian Sari bahwa kurikulum 2013 masih menghadapi permasalahan pada aspek pendekatan pembelajaran. Sebelumnya, proses pembelajaran lebih menekankan pada penyampaian materi, sementara Kurikulum 2013 diarahkan untuk membentuk peserta didik yang inovatif, kreatif, dan produktif (Juliani et al., 2024). Kurikulum ini merupakan pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dirancang untuk menutupi berbagai kelemahan kurikulum sebelumnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Melalui pembelajaran yang menekankan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, diharapkan tumbuh sikap spiritual dan sosial yang mampu membangun budaya religius di lingkungan sekolah.

Kurikulum 2013 memiliki sejumlah karakteristik utama. Pertama, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dirumuskan secara berjenjang dan berkelanjutan dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA. Meskipun kurikulum sebelumnya telah bersifat berjenjang, struktur tersebut belum teridentifikasi secara jelas karena kompleksitas kompetensi yang ada. Kedua, pendidikan karakter diintegrasikan secara menyeluruh tanpa mengubah alur kurikulum berbasis kompetensi yang telah diterapkan sejak 2004 dan dilanjutkan melalui KTSP tahun 2006. Ketiga, Kurikulum 2013 mengakomodasi berbagai aliran filsafat pendidikan, seperti esensialisme, perenialisme, rekonstruksionisme sosial, progresivisme, dan humanisme, sehingga tidak terikat pada satu pandangan filosofis tertentu. Keempat, kurikulum ini menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkreasi sebagai indikator keberhasilan lulusan.

Dari sisi isi dan struktur, Kurikulum 2013 mengurangi jumlah mata pelajaran namun menambah alokasi jam belajar pada setiap mata pelajaran. Proporsi pencapaian kompetensi pada empat ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan telah dirumuskan, meskipun panduan ketercapaiannya masih terbatas. Kerangka dasar kurikulum dikembangkan berdasarkan keberagaman budaya bangsa Indonesia dan diarahkan untuk membentuk kehidupan yang lebih baik melalui pengembangan potensi peserta didik. Secara teoretis, Kurikulum 2013 berlandaskan pada pendidikan berbasis standar dan kompetensi. Penambahan jam pelajaran dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik agar mampu bersaing secara global dan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju, tanpa mengabaikan hak-hak perkembangan peserta didik.

Latar Belakang Kurikulum Merdeka

Perkembangan Kurikulum Merdeka mencerminkan dinamika kebijakan pendidikan yang dirancang untuk merespons kebutuhan pembelajaran pada masa pandemi dan periode pascapandemi. Kurikulum Merdeka hadir sebagai alternatif pengganti Kurikulum Darurat ketika Kurikulum 2013 tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi kondisi pembelajaran selama pandemi COVID-19 (Fatmawati & Jaya, 2025). Pemerintah tidak mewajibkan satuan pendidikan untuk segera mengadopsi kurikulum ini, melainkan memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih antara Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, atau Kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan dan karakteristik masing-masing. Kebijakan ini menjadi landasan penting bagi penyesuaian pembelajaran agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kapasitas pendidik di berbagai daerah.

Kehadiran Kurikulum Merdeka sebagai kelanjutan dari Kurikulum Darurat sekaligus menandai evaluasi terhadap Kurikulum 2013 yang telah lama diterapkan sejak menggantikan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Lestari menyatakan bahwa krisis pandemi menjadi momentum lahirnya kebijakan kurikulum yang lebih adaptif (Lestari et al., 2025). Hal ini diwujudkan melalui peluncuran resmi Kurikulum Merdeka oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Nomor 56/M/2022. Kurikulum ini diposisikan sebagai fondasi pemulihan pembelajaran sekaligus sarana pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang memiliki karakter kritis, kreatif, mandiri, religius, dan berakhlak mulia.

Secara paradigmatik, Kurikulum Merdeka membawa pembaruan pada berbagai aspek, mulai dari kerangka dasar, capaian pembelajaran, struktur kurikulum, pembelajaran berdiferensiasi, hingga sistem asesmen yang lebih menekankan pendekatan formatif. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi sekolah dalam pengaturan jam pelajaran, pengembangan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta pengelolaan perangkat kurikulum yang lebih sederhana dan mudah diterapkan. Penekanan pada pembelajaran berbasis proyek diarahkan untuk memperkuat karakter serta kompetensi abad ke-21, seperti kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis.

Kerangka kebijakan Merdeka Belajar, pemerintah menegaskan transformasi pendidikan melalui penguatan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila. Kebijakan ini juga merupakan respons terhadap hasil asesmen internasional, seperti PISA 2019, yang menunjukkan rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik Indonesia. Oleh karena itu, Merdeka Belajar dirancang untuk mengurangi beban administratif guru, memperluas ruang kebebasan belajar, serta meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran melalui asesmen kompetensi

minimum dan survei karakter. Empat pokok kebijakan Merdeka Belajar—penggantian USBN dengan asesmen kompetensi, penghapusan Ujian Nasional, penyederhanaan RPP, serta penyesuaian sistem PPDB zonasi—secara keseluruhan diarahkan untuk menciptakan iklim pendidikan yang lebih humanis, relevan, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik.

Perbedaan Konseptual K13 dan Kurikulum Merdeka

Kurikulum 2013 merupakan seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis ilmu pengetahuan yang dirancang oleh lembaga pendidikan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa Indonesia. Sistem pembelajaran dalam kurikulum ini menekankan partisipasi aktif peserta didik melalui proses mengamati, menanya, menalar, memverifikasi, dan mengomunikasikan pengetahuan yang diperoleh. Pengembangan Kurikulum 2013 tidak terlepas dari fenomena keilmuan, sosial, seni, dan budaya yang berkembang di masyarakat (Saputra & Sesmiarni, 2025). Kurikulum ini berorientasi pada keseimbangan pengembangan ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif guna mendorong terbentuknya peserta didik yang kreatif, inovatif, dan produktif serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Peran strategis dalam menjawab tantangan global, sehingga pembelajaran harus diarahkan pada pembentukan karakter (*character building*) sebagai tujuan utama Kurikulum 2013. Melalui pendekatan tematik terpadu, peserta didik dibekali pemahaman tentang lingkungan sekitar, kehidupan sosial, dan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar pembentukan kepribadian. Nurhasanah menjelaskan bahwa tujuan Kurikulum 2013 meliputi peningkatan mutu pendidikan melalui keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan; pembentukan sumber daya manusia yang inovatif dan produktif; kemudahan penyampaian bahan ajar melalui perangkat kurikulum yang disiapkan pemerintah; serta peningkatan partisipasi satuan pendidikan dalam pengembangan mutu. Selain itu, kurikulum ini juga mendorong kompetisi sehat antar sekolah melalui kewenangan pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan lokal (Dendodi et al., 2024).

Kurikulum Merdeka hadir sebagai inovasi kebijakan pendidikan yang diinisiasi untuk mengembalikan pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan masyarakat. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan. Kurikulum Merdeka berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing (Pratycia et al., 2023). Namun, dalam

implementasinya, masih banyak pendidik yang menghadapi tantangan, terutama dalam menyesuaikan lingkungan belajar dengan tuntutan kurikulum yang baru.

Kurikulum 2013 masih dapat diterapkan sambil sekolah mempersiapkan adopsi Kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kebijakan masing-masing satuan pendidikan. Salah satu tujuan utama Kurikulum Merdeka adalah mengatasi ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi COVID-19 (Saely, 2023). Kurikulum ini mengedepankan kebebasan berpikir, suasana belajar yang menyenangkan, serta pembelajaran tanpa tekanan nilai dan peringkat. Hakikat Kurikulum Merdeka menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran dengan memperhatikan minat dan potensi individual.

Secara konseptual, Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dengan penekanan pada pembangunan karakter dan standar pendidikan tertentu. Proses pembelajaran dirancang interaktif, inspiratif, inovatif, dan kontekstual agar peserta didik aktif mengembangkan keterampilan serta minat sesuai karakteristik psikologisnya. Implementasi kurikulum ini mencakup pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar, dengan perubahan utama pada standar isi, proses, penilaian, dan kriteria ketuntasan minimal. Fokus pembelajaran tidak lagi semata-mata pada kelulusan ujian, melainkan pada pendidikan yang holistik.

DISKUSI

Gambaran Umum Kurikulum 2013 (K13)

Kurikulum 2013 (K-13) merupakan pengembangan lanjutan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dirancang sebagai respons terhadap dinamika perubahan sosial, budaya, dan tuntutan global. Salah satu tantangan utama Kurikulum 2013 terletak pada perubahan pendekatan pembelajaran, dari orientasi berbasis materi menuju pendekatan berbasis kompetensi. Perubahan ini menuntut transformasi peran pendidik dan peserta didik, di mana peserta didik diposisikan sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan sekadar penerima informasi. Melalui pendekatan tersebut, Kurikulum 2013 diarahkan untuk membentuk individu yang kreatif, inovatif, dan produktif melalui integrasi penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara konseptual, Kurikulum 2013 menempatkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai pijakan utama yang disusun secara berjenjang dan berkelanjutan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pendekatan berkesinambungan ini menegaskan kesinambungan pengembangan kompetensi peserta didik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung berjenjang

namun kurang terpetakan secara sistematis, Kurikulum 2013 berupaya memperjelas keterkaitan antarjenjang sehingga arah capaian pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terukur.

Kurikulum 2013 juga menegaskan integrasi pendidikan karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pembelajaran. Pendidikan karakter diinternalisasikan dalam setiap aktivitas pembelajaran tanpa menjadikannya sebagai mata pelajaran tersendiri. Integrasi ini tetap berada dalam kerangka Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah diterapkan sejak 2004 dan dilanjutkan melalui KTSP 2006, sehingga Kurikulum 2013 tidak memutus paradigma sebelumnya, melainkan memperkuat orientasi pembelajaran yang holistik dan berkelanjutan.

Kurikulum 2013 bersifat eklektik dengan mengakomodasi berbagai aliran filsafat pendidikan, seperti esensialisme, perenialisme, rekonstruksi sosial, progresivisme, dan humanisme. Pendekatan ini mencerminkan upaya kurikulum untuk bersikap adaptif terhadap kompleksitas kebutuhan pendidikan nasional. Kurikulum tidak dibangun atas satu aliran filsafat yang dominan, melainkan dirancang secara fleksibel agar mampu menjawab tantangan zaman serta kebutuhan peserta didik sebagai individu dan warga masyarakat.

Kurikulum 2013 diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui aktivitas menalar, mengomunikasikan, dan mencipta. Keberhasilan kurikulum tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi juga dari kemampuan lulusan dalam menganalisis permasalahan, menyampaikan gagasan secara efektif, serta menghasilkan karya kreatif. Orientasi ini sejalan dengan tuntutan keterampilan abad ke-21 yang menekankan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas.

Dalam aspek isi dan struktur, Kurikulum 2013 melakukan penyederhanaan jumlah mata pelajaran yang diimbangi dengan penambahan alokasi waktu pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang pendalaman materi dan proses pembelajaran yang lebih bermakna. Namun demikian, pengaturan proporsi ketercapaian kompetensi pada ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan masih memerlukan penjabaran operasional yang lebih jelas, sehingga menuntut peran aktif pendidik dalam implementasinya. Secara teoretis, pengembangan Kurikulum 2013 berlandaskan pada prinsip pendidikan terstandar dan pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan terstandar menetapkan standar nasional sebagai batas minimal mutu pendidikan, sedangkan pendidikan berbasis kompetensi menekankan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Penambahan alokasi waktu pembelajaran dipandang sebagai strategi untuk mendukung pencapaian kompetensi

tersebut sekaligus sebagai upaya mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan nasional dalam konteks persaingan global.

Secara keseluruhan, Kurikulum 2013 merepresentasikan upaya sistematis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan penguatan karakter. Meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pendekatan pembelajaran dan ketercapaian kompetensi, Kurikulum 2013 tetap menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing dan berkarakter.

Latar Belakang Kurikulum Merdeka

Kemunculan Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari dinamika kebijakan pendidikan nasional dalam merespons krisis pembelajaran yang terjadi selama dan setelah pandemi Covid-19. Situasi darurat pendidikan sejak tahun 2020 mengungkap keterbatasan Kurikulum 2013 dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, mengatasi kesenjangan akses pendidikan, serta menjaga capaian belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kelanjutan dari Kurikulum Darurat yang sebelumnya diterapkan ketika Kurikulum 2013 dinilai kurang adaptif terhadap kondisi pembelajaran pada masa pandemi (Fatmawati & Jaya, 2025).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kewajiban mutlak bagi seluruh satuan pendidikan, melainkan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memilih kurikulum sesuai dengan kesiapan dan konteks masing-masing. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan adaptif dan partisipatif pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran yang bermakna tanpa menimbulkan tekanan struktural bagi pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka diposisikan sebagai alternatif transformasi, bukan sebagai kebijakan yang bersifat memaksa.

Secara historis, lahirnya Kurikulum Merdeka juga menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap Kurikulum 2013 yang telah diterapkan dalam jangka waktu relatif panjang. Pandemi menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk merancang kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil pembelajaran (Lestari et al., 2025). Hal ini diwujudkan melalui peluncuran resmi Kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Nomor 56/M/2022. Kurikulum ini dirancang tidak hanya untuk pemulihan pembelajaran (*learning recovery*), tetapi juga untuk memperkuat pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang berkarakter kritis, kreatif, mandiri, religius, dan berakhlak mulia.

Dari sisi paradigmatis, Kurikulum Merdeka menghadirkan pembaruan pada berbagai komponen kurikulum, mulai dari kerangka dasar, capaian pembelajaran, hingga struktur, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kemampuan, minat, serta kebutuhan peserta didik. Selain itu, asesmen dirancang lebih formatif dan berorientasi pada proses perkembangan belajar, sehingga penilaian tidak semata-mata menitikberatkan pada hasil akhir.

Penguatan pembelajaran berbasis proyek melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi karakteristik utama Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dengan struktur kurikulum yang lebih sederhana dan fleksibel, sekolah memperoleh ruang untuk mengelola waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka juga menjadi respons terhadap rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik Indonesia sebagaimana tercermin dalam hasil PISA 2019. Oleh karena itu, pemerintah mendorong transformasi sistem evaluasi melalui penerapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter.

Empat kebijakan utama Merdeka Belajar, yakni penghapusan Ujian Nasional, penggantian USBN dengan asesmen kompetensi, penyederhanaan RPP, serta penyesuaian sistem PPDB berbasis zonasi, semakin menegaskan arah pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka dirancang sebagai strategi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang fleksibel, inklusif, dan relevan dengan tuntutan zaman, sekaligus memperkuat peran sekolah dan guru sebagai aktor utama transformasi pendidikan nasional.

Perbedaan Konseptual K13 dan Kurikulum Merdeka

Kurikulum 2013 dikembangkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan keterpaduan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses pembelajaran. Dalam kerangka ini, peserta didik diposisikan sebagai pelaku aktif pembelajaran yang terlibat dalam kegiatan mengamati, menanya, menalar, serta mengomunikasikan hasil belajarnya. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya sistematis untuk membentuk peserta didik yang kreatif, inovatif, dan produktif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan budaya yang terus berubah (Saputra & Sesmiarni, 2025). Oleh karena itu, orientasi Kurikulum 2013 tidak hanya menitikberatkan pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keberlanjutan pembangunan manusia.

Secara konseptual, pendidikan karakter menjadi inti dalam implementasi Kurikulum 2013. Rusman dan Djohar menegaskan bahwa pendidikan berperan strategis dalam menyiapkan peserta didik agar memiliki tanggung jawab sosial dan karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan global. Pembelajaran tematik terpadu, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, menjadi ciri khas kurikulum ini dengan tujuan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari dan lingkungan sosial peserta didik. Selain itu, Kurikulum 2013 menyediakan panduan pembelajaran yang relatif terstruktur karena perangkat kurikulum disusun secara terpusat oleh pemerintah, sehingga memudahkan pendidik dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, pola pengelolaan yang cenderung sentralistik membatasi fleksibilitas satuan pendidikan. Meskipun sekolah diberi ruang untuk mengembangkan kurikulum, kebebasan tersebut tetap berada dalam batas standar nasional yang ketat. Kondisi ini berbeda dengan Kurikulum Merdeka yang menempatkan otonomi sekolah dan guru sebagai prinsip utama dalam pengelolaan pembelajaran. Kurikulum Merdeka lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pemulihan pembelajaran pascapandemi Covid-19 sekaligus sebagai jawaban atas dinamika perubahan zaman yang semakin kompleks. Kurikulum Merdeka mengusung filosofi kebebasan belajar yang menghargai keberagaman minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Pembelajaran dirancang lebih fleksibel dan kontekstual, sehingga sekolah memiliki kewenangan lebih luas dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan belajar. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing (Pratycia et al., 2023).

Perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka terletak pada orientasi pengelolaan kurikulum. Kurikulum 2013 menekankan pencapaian standar kompetensi lulusan melalui struktur pembelajaran yang relatif seragam, sedangkan Kurikulum Merdeka berfokus pada diferensiasi pembelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dalam Kurikulum Merdeka, penilaian diarahkan pada proses dan perkembangan belajar peserta didik, bukan semata-mata pada angka dan peringkat, sejalan dengan prinsip bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang unik.

Meskipun menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait kesiapan pendidik dan manajemen sekolah. Tidak sedikit guru yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan strategi pembelajaran dengan tuntutan kurikulum yang lebih adaptif dan berbasis proyek (Dendodi et

al., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kompetensi profesional guru, kepemimpinan kepala sekolah, serta konsistensi dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memiliki tujuan yang sejalan, yaitu meningkatkan mutu pendidikan nasional dan membentuk sumber daya manusia yang berkarakter serta kompeten. Perbedaannya terletak pada pendekatan konseptual dan strategi implementasi. Kurikulum 2013 menekankan standarisasi dan penguatan karakter melalui struktur pembelajaran yang sistematis, sedangkan Kurikulum Merdeka mengedepankan fleksibilitas, kemandirian, dan keberagaman potensi peserta didik. Dengan demikian, kedua kurikulum tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari proses evolutif sistem pendidikan nasional yang saling melengkapi dalam menjawab tantangan pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memiliki kesamaan tujuan, yakni mengembangkan kompetensi peserta didik secara komprehensif yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 disusun dengan pendekatan pembelajaran tematik dan saintifik yang menekankan penguatan pendidikan karakter serta pencapaian standar kompetensi lulusan secara berjenjang. Namun, dalam praktiknya, kurikulum ini dinilai kurang lentur dalam menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, terutama dalam menghadapi tantangan pembelajaran pada masa pandemi dan pascapandemi. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kurikulum Merdeka hadir sebagai bentuk transformasi kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan kontekstual. Kurikulum ini memberikan ruang otonomi yang lebih luas kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan asesmen formatif, serta penguatan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila menjadi strategi utama dalam implementasinya. Selain itu, fleksibilitas struktur kurikulum dan penyederhanaan perangkat pembelajaran menjadi keunggulan penting dalam mendukung proses belajar yang lebih bermakna dan relevan. Peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi peserta didik dan kreativitas guru dalam pembelajaran. Meskipun peningkatan hasil belajar secara signifikan belum sepenuhnya terlihat,

perubahan paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memberikan fondasi yang kuat bagi peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Annur, S. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Noerfikri.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Sage Publications.
- Dendodi, Nurdiana, Astuti, Y. D., & Aunurrahman, W. (2024). Dampak dan tantangan terhadap Transformasi kurikulum di Satuan Pendidikan. *Journal of Education Research*, 5(2), 1071–1080.
- Fatmawati, T., & Jaya, A. (2025). Transformasi Pendidikan Dasar melalui Kurikulum Merdeka: Analisis Dampak pada Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa. *JURNAL BASICEDU*, 7(1), 14–30. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v7i1.811>
- Ibrahim, I., Rusli, R., & Sukardi, I. (2025). Moderasi dalam Dialektika Universalisme Islam dan Islam Lokal. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(3), 469–486. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i3.7130>
- Ibrahim, Marhama, & Alya, N. (2023). Kepala Madrasah sebagai Motivator. *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 46–55.
- Iskandar, S., Rosmana, P. S., Farhatunnisa, G., & Mayanti, I. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 2322–2336.
- Juliani, I., Purnama Sari, D., Indrianti, T., Syahfitri, R., & Najla, A. (2024). Reformulation of Islamic Religious Education Curriculum for Adaptive and Inclusive Education. *Journal of Contemporary Global and Cultural Studies*, 2(1), 45–62.
- Lestari, D. A., Qodriyah, L., & Azizah, W. N. (2025). Menelaah Kurikulum Merdeka sebagai Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Chatra: Jurnal Pendidikan & Pengajaran*, 3(1), 3–4.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Pratyca, A., Putra, A. D., Ghina, A., Salsabila, M., & Adha, F. I. (2023). Analisa Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 58–64.
- Saely, S. E. (2023). Analisis Kritis Perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(1), 34–43.
- Saputra, R., & Sesmiarni, Z. (2025). Karakteristik Kurikulum KBK, KTSP, K.13 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(5), 114–121.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.